

BERAGAM ISU MENYANGKUT KEBIJAKAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEDESAAN

Ilona V. Oisina Situmeang
Pascasarjana Fakultas Komunikasi UPI-YAI, Jakarta
Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat
ilonaoisina@yahoo.com

Abstrak

Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur yang sangat penting diperhatikan dalam menyongsong era globalisasi, dengan SDM yang berkualitas merupakan aset pembangunan bangsa yang perlu diperhatikan dan dibina terutama dalam bidang pertanian. Namun untuk menciptakan SDM di bidang pertanian yang berkualitas menghadapi banyak kendala, diantaranya sangat kurangnya jumlah dan kualitas SDM, dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga belum mampu untuk menyerap informasi dan mengadopsi teknologi pertanian yang baru. Aparatur pertanian dipandang bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai SDM, yang menempatkan aparatur pertanian sebagai manusia seutuhnya. SDM dari aparatur pertanian diharapkan dapat menjadi fasilitator, motivator dan dinamisator dalam komunikasi pembangunan pertanian agar terjadi gerakan pembangunan pertanian oleh petani, pengusaha pertanian dan pedagang pertanian sebagai subyek dalam pembangunan pertanian itu sendiri.

Kata kunci: SDM, pertanian, komunikasi pertanian

Abstract

Human Resources is the most important element that have to be noticed to facing the globalization era, with a good quality of Human Resources for the asset of the nation building that have to be noticed and build especially in the agricultural. But there are many obstacles to create a good quality of Human Resources, for example, the lack of the number and the quality of Human Resources. It is because of the level of education is still low and they are not able to absorb the information and adopt the new agricultural technology. The agricultural apparatus is not only as a labor, but also as the Human Resources, that makes the agricultural apparatus human beings completely. The Human Resources of agricultural apparatus is expected to become a facilitator, motivator and dynamist of the communications agricultural development in order to make a movement of agricultural development by the farmers; while the agricultural entrepreneurs and the agricultural merchants are the subject of this agricultural development.

Keywords: human resources, agricultural, agriculturat communication

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpenduduk lebih dari 220 juta jiwa mendiami wilayah yang terdiri dari lima pulau besar dan ribuan pulau kecil serta dikelilingi oleh lautan dan berada dalam lintasan khatulistiwa merupakan negara yang daerahnya amat subur. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, dimana mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan serta menggantungkan hidupnya kepada kesuburan tanah sebagai petani. Dalam menjalankan roda pemerintahan, maka sektor pertanian merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk dikembangkan, baik itu dalam bentuk penyediaan dana pada APBN untuk mendukung sarana dan prasarana pertanian maupun untuk

peningkatan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkaitan dengan sektor pertanian. SDM tersebut baik yang bergerak sebagai tenaga pemikir pertanian, penyuluh pertanian, penggerak pertanian maupun masyarakat setempat sebagai petani langsung.

Sektor pertanian juga telah terbukti merupakan sektor yang paling tangguh bertahan dalam keadaan krisis moneter yang pernah kita alami beberapa tahun yang lalu, disaat semua sektor mengalami pertumbuhan yang negatif, justru sektor pertanian mampu membuktikan diri sebagai penyangga ekonomi secara nasional walau sektor pertanian ini tidak mampu memberikan kesejahteraan yang baik kepada masyarakat yang bekerja di sektor ini. Karenanya salah satu cara

yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan adalah melalui pembangunan pertanian dengan meningkatkan produktivitas hasil pangan sehingga akan terjadi peningkatan kesejahteraan bagi mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Komunikasi Pembangunan

Komunikasi pembangunan dapat dilihat dalam arti luas dan arti sempit. *Dalam arti luas*, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan; terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. *Dalam arti sempit*, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan (Gumilar, 2008).

Tugas pokok komunikasi Pembangunan dalam suatu perubahan sosial untuk pembangunan nasional, yaitu:

1. Menyampaikan informasi tentang pembangunan nasional kepada masyarakat agar dapat memusatkan perhatian pada kebutuhan akan perubahan, kesempatan dan cara mengadakan perubahan, sarana-sarana perubahan, dan membangkitkan aspirasi nasional.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak yang membuat keputusan mengenai perubahan, memberi kesempatan kepada para pemimpin masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, serta menciptakan arus informasi yang berjalan lancar dari bawah ke atas.
3. Mendidik tenaga kerja yang diperlukan dalam pembangunan yang mendukung proses untuk mengubah hidup masyarakat.

Di Indonesia, minimal sampai akhir 1970-an, komunikasi pembangunan masih menggabungkan pendekatan media massa dan komunikasi interpersonal. Kesadaran tersebut meng-

hasilkan ide tentang hubungan komunikasi dan partisipasi, yang disebut sebagai pembangunan yang lain (*another development*). Partisipasi yang dituju tidak sekedar alat pembangunan, melainkan suatu tujuan akhir pembangunan. Penelitian pun dilaksanakan secara partisipatif.

Kebijakan Ketahanan Pangan di Indonesia

Masalah ketahanan pangan memang merupakan isu emosional, problem kelaparan kronis, kurangnya persediaan pangan lokal dan juga lonjakan tiba-tiba dari harga pangan dapat dengan mudah menyulut semangat publik luas untuk melakukan sesuatu. Pada hakekatnya persoalan ketahanan pangan adalah isu ekonomi, hanya dengan kebijaksanaan ekonomi yang baik, maka ketahanan pangan yang berkesinambungan dapat diwujudkan. (Timmer, 2002)

Dalam beberapa keadaan, terjadi pertentangan kepentingan antara kebijaksanaan ekonomi untuk efisiensi dan pertumbuhan dengan kebijaksanaan redistribusi dan pemerataan pendapatan. Hal ini juga terjadi pada kebijaksanaan yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Umumnya kebijakan ketahanan pangan di Indonesia dimaksudkan untuk beberapa tujuan sekaligus yaitu :

1. Mencapai keadaan swasembada pangan.
2. Membantu memperbaiki pendapatan produsen produk pangan.
3. Menjamin penyediaan bahan pangan untuk konsumen di kota dengan harga yang terjangkau dan stabil.

Selain berbagai aspek tersebut di atas, ada aspek lain lagi yang terkait erat dengan kebijaksanaan ketahanan pangan yang selama ini kurang diperhatikan secara mendalam melalui kegiatan kegiatan penelitian, yaitu aspek keseimbangan lingkungan, juga pemanfaatan sumberdaya melebihi kapasitasnya dapat menyebabkan siklus alami dan keseimbangan lingkungan terganggu.

Hubungan Pertanian Desa dan Industri di Kota

Perdebatan mengenai hubungan antara pedesaan dengan perkotaan menjadi hal yang mengemuka dalam teori ekonomi pembangunan, hal ini mengingatkan begitu dominannya peranan sektor pertanian di hampir semua negara berkembang, ada beberapa faktor yang melandasi anggapan pengabaian sektor pertanian yaitu :

1. Sebagian besar para pengambil keputusan dan para pakar dibidang ekonomi pembangunan berasal dari kaum elit kota dan tidak begitu memahami perbedaan sifat dan karakteristik sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa
2. Model pembangunan lebih memprioritaskan pentingnya akumulasi kapital yang identik dengan pembangunan industri.
3. Memandang pertanian sebagai penyedia surplus tenaga kerja yang dapat ditransfer ke sektor industri tanpa membutuhkan biaya transfer.
4. Dalam proses pembangunan pertanian para petani tradisional sering dianggap sangat terikat pada nilai-nilai tradisi dan tidak responsif terhadap insentif pasar.

Dalam model pertumbuhan di beberapa wilayah inti perkotaan akan mengatur wilayah wilayah pedesaan untuk melayani kepentingan kota, sehingga mendatangkan arus perputaran modal, *brain drain* dan transfer sumber daya dari pertumbuhan wilayah pedesaan. Hubungan perkotaan pedesaan, sumber utama pertumbuhan dari perkotaan ternyata datang dari kenaikan permintaan barang-barang non-agricultural pada rumah pedesaan, selain itu tampak pula ketersediaan sektor perkotaan sebagai konsumen komoditas pertanian mampu meningkatkan kesejahteraan di wilayah pedesaan dan menaikkan pendapatan riil untuk seluruh rumah tangga pedesaan. Ada satu kesamaan yang sangat mendasar sekali diungkapkan yaitu keterkaitan perkotaan pedesaan selalu membutuhkan pemerintah.

Komunikasi Partisipatif

Menurut Singhal (2001) (*dalam* Chitnis 2011) mengartikan komunikasi partisipatif adalah sebuah proses dinamis, interaktif dan transformasional, dimana orang terlibat dalam dialog, dengan individu dan kelompok masyarakat dalam rangka merealisasikan potensi secara penuh agar dapat meningkatkan kehidupan mereka. Nair and White (2004) mendefinisikan komunikasi partisipatif sebagai “*the opening of dialogue, source and receiver interacting continuously, thinking constructively about the situation, identifying developmental needs and problems, deciding what is needed to improve the situation, and acting upon that*”.

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi partisipatif adalah pertukaran berbagai pesan diantara stakeholder yang terlibat dalam proses pem-

angunan melalui dialog untuk mencapai pengertian bersama (*common understanding*) dan konsensus untuk proses pengambilan keputusan. Dialog dan pemecahan masalah secara bersama sebagai basis komunikasi dalam program pembangunan yang mengklaim sebagai partisipatif berarti masyarakat saling bertukar informasi dan bekerja sama dengan *outsiders* (aparatur penyedia program, fasilitator dan elit lokal) dalam proses pengambilan keputusan.

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan (perspektif subyektif) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak mementingkan angka atau kuantifikasi fenomena. Disosialisasikan dengan kumpulan dan analisa data yang berupa kata-kata atau observasi langsung terhadap tingkah laku, jadi fokusnya adalah lebih pada interpretasi daripada kuantifikasi serta sangat menerima subyektifitas sehingga yang bernilai adalah perspektif partisipan dan interpretasinya terhadap situasi (Cassel & Symon, 1994). Pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Analisis data dilakukan terhadap data berdasarkan logika induktif. Analisis akan bergerak dari sesuatu hal yang khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh dari tinjauan pustaka bergerak kepada temuan yang bersifat umum yang akan muncul lewat analisis data berdasarkan teori yang digunakan.

Analisis Data

Kerangka makro kebijakan komunikasi pembangunan pertanian dan pedesaan

Kebijakan komunikasi pembangunan pertanian bertujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani melalui pengembangan sistem agribisnis dan usaha agribisnis
2. Mewujudkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya pangan lokal di setiap daerah
3. Meningkatkan daya saing produk pertanian dan ekspor hasil pertanian
4. Mengembangkan aktivitas ekonomi pedesaan melalui pembangunan sistem agribisnis dan perusahaan agribisnis yang berdaya saing,

berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralisasi.

5. Meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha secara adil melalui pengembangan sistem agribisnis.

Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan menyeimbangkan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan.

Beberapa ide dasar paham ini meliputi: (Lutfi Fatah, 2006)

1. Proses pembangunan itu mesti berlangsung secara berlanjut terus menerus, kontinyu, ditopang oleh sumber alam yang berlanjut dan manusia yang berkembang secara berlanjut.
2. Sumber alam terutama udara, air dan tanah memiliki ambang batas, di atas mana penggunaannya akan menciutkan kuantitasnya. Penciutan itu berarti berkurang kemampuan sumber alam tersebut untuk menopang pembangunan secara berlanjut sehingga menimbulkan gangguan pada keserasian sumber alam dengan sumber daya manusia.
3. Kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup. Semakin baik kualitas lingkungan, semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup yang antara lain tercermin pada meningkatnya kualitas fisik pada harapan usia hidup, pada turunnya tingkat kematian dan lain sebagainya.
4. Dalam pembangunan berkelanjutan pola penggunaan sumber daya alam masa kini mestinya tidak menutup kemungkinan pilihan lain di masa depan.
5. Pembangunan berkelanjutan mengandaikan solidaritas transgenerasi, dimana pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang untuk meningkatkan kesejahteraannya, tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Pembangunan berkelanjutan atau pembangunan berwawasan lingkungan atau *sustainable development* mempunyai ciri khas yaitu: Pembangunan berwawasan lingkungan harus memenuhi kebutuhan masa kini dan memperhitungkan kepentingan generasi yang akan datang. Oleh karena pembangunan harus berkelanjutan dan merata dan berkeadilan sosial, maka pembangunan de-

ngan pemerataan masih perlu menduduki posisi sentral dalam pembangunan jangka panjang tahap kedua.

Melalui dukungan Perpres No.5 tahun 2010, tentang sasaran pembangunan perdesaan yaitu: Menguatnya kapasitas dan peran pemerintahan desa, serta kelembagaan masyarakat, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik termasuk meningkatnya kapasitas (teknis dan fiskal) pemerintah kabupaten dalam pembangunan perdesaan. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat, termasuk meningkatnya taraf pendidikan, dan status kesehatan. Meningkatnya pengembangan ekonomi perdesaan, melalui penciptaan kemudahan/akses berusaha, kesempatan kerja, dan peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan terhadap permodalan, lahan, pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan (termasuk di dalamnya agrowisata, dan agroindustri), pengembangan kewirausahaan, pengelolaan pasar desa serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan BUMDes/Kel. Meningkatnya sarana prasarana perdesaan yang mendukung percepatan pembangunan perdesaan. Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, berwawasan mitigasi bencana termasuk meningkatnya ketahanan pangan masyarakat perdesaan. Diharapkan keseluruhan sasaran diatas mampu tertuang dalam program penyuluhan pertanian sehingga secara ter sistematis dapat memberikan sumbangan kontribusi nyata bagi perubahan kualitas SDM Pertanian di Perdesaan secara signifikan.

Proses pembangunan memerlukan sumber daya alam dengan menggunakan energi, karena laju pembangunan meningkat baik didalam maupun diluar negeri maka terjadilah tekanan semakin besar terhadap sumber daya alam dan energi tadi. Mengelola sumber daya alam agar menopang proses pembangunan harus diupayakan agar proses tersebut tidak menghasilkan limbah yang mencemarkan sehingga kualitas lingkungan menurunkan kualitas hidup. Pola pembangunan 25 tahun yang akan datang yang perlu dikembangkan adalah pola pembangunan yang berkelanjutan, dimana kebijakan energi, industri, pertanian dan pemukiman harus bertumpu pada pengembangan teknologi yang memungkinkan pemanfaatan sumber alam secara berkelanjutan. Proses pembangunan berkelanjutan tersebut harus bergeser dari penggunaan sumber daya alam

secara besar besaran menjadi penggunaan sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan.

Pada umumnya di negara sedang berkembang, pertanian besar kontribusinya terhadap pendapatan, terutama dalam perannya sebagai sumber mata pencaharian utama dan sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Pertanian juga penting dalam hubungannya dengan perdagangan internasional maupun dengan pasar domestik. Kebijakan ketahanan pangan juga dapat membawa dampak pada kualitas lingkungan. Intervensi harga dan subsidi kepada produsen untuk peningkatan produksi pangan, selain mengakibatkan alokasi sumberdaya yang tidak efisien dan hilangnya kesempatan mengalihkan sumberdaya bagi penggunaan untuk proses produksi komoditas pertanian lain yang bernilai lebih tinggi, juga dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan lingkungan.

Bagi negara negara berkembang aspek keseimbangan lingkungan belum begitu menjadi perhatian, namun pada negara maju aspek tersebut telah menjadi pertimbangan yang utama dalam pengembangan pertanian. Bagi negara berkembang hal ini disebabkan kesadaran akan pentingnya kualitas lingkungan bagi kesejahteraan masih rendah di kalangan penduduk dan pengambil keputusan juga karena aspek lingkungan ini memang sangat sulit untuk mengkuantifikasikannya.

Untuk negara negara berkembang, dimana pangan merupakan standart pengupahan (*wage good*) peningkatan produktivitas pertanian penting untuk menjaga harga pangan tetap terjangkau, karena dampak dari harga pangan yang terlalu tinggi dapat membahayakan perekonomian. Peningkatan produktivitas pertanian dapat sekaligus membantu meningkatkan taraf hidup para petani, membangun pasar domestik untuk produk produk industri dan memperbaiki nilai tukar. Upaya dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di pertanian secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok yaitu :

1. Kebijakan tidak langsung

Kebijakan ini diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Dalam kerangka kebijakkan ini, strategi atau arah baru pembangunan perlu dilandaskan pada konsep efisiensi dan efektivitas, yakni mengoptimalkan segala jenis sumberdaya dan perangkat

pendukungnya untuk usaha produktif, seperti keberpihakan kepada yang lemah, pemberian otonomi sampai ketingkat paling rendah dan modernisasi.

2. Kebijakan langsung

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan akses terhadap sasaran penanggulangan kemiskinan secara nasional dalam prasarana dan sarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat berpendapatan rendah berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan. Bentuk yang paling tepat dalam upaya pengembangan ekonomi rakyat ini adalah melalui pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama dalam wadah koperasi.

3. Kebijakan khusus

Kebijaksanaan ini diutamakan pada penyiapan penduduk miskin untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat. Upaya ini mendorong dan mempelancar proses transisi dari kehidupan subsistem menjadi kehidupan komersial. Penyiapan penduduk ini bersifat situasional sesuai dengan tingkat permasalahan dan kesiapan masyarakat itu sendiri. Peran tokoh masyarakat termasuk aparat daerah yang paling dekat dengan masyarakat menjadi amat penting dalam proses transisi ini.

Peningkatan Pendapatan Penduduk Perdesaan

Pembagian administratif negara kita terdiri dari

1. Wilayah Propinsi
2. Wilayah Kabupaten / Kota
3. Wilayah Kecamatan
4. Wilayah desa

Dalam pengertian administrasi kita dapat menjumpai berbagai jenis desa, misalnya Desa pegunungan, desa dataran rendah, desa dataran tinggi dan desa pantai, dengan pola pertanian atau usaha sebagai berikut :

1. Desa dengan petani sawah yang menetap dengan mengandalkan pengairan atau tadah hujan.
2. Kampung dengan peladang berpindah pindah
3. Desa perkebunan rakyat
4. Desa nelayan.

Desa sering disamakan sebagai masyarakat petani dalam kenyataan kombinasi dengan usaha

usaha kecil lainnya di luar pertanian yang sangat bervariasi, karenanya pembangunan di pedesaan sangat erat kaitannya dengan pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian pada dasarnya adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup petani yang dicapai melalui strategi investasi dan kebijaksanaan. Hubungan daerah pedesaan dengan perkotaan pada umumnya bertambah erat dengan cepat walaupun ada desa desa yang letaknya terpencil.

Hubungan bukan karena letak atau jarak yang dekat saja tetapi dipengaruhi juga oleh pemenuhan kebutuhan daerah pedesaan yang berorientasi pada kota, misalnya perdagangan hasil pertanian dari desa ke kota, mengikuti pendidikan dari desa ke kota, penawaran tenaga kerja dari desa ke kota, juga melalui media massa seperti radio dan televisi

Keberhasilan swasembada beras yang pernah dicapai oleh negara republik Indonesia pada tahun 1984 merupakan jasa dari para petani kita yang mendukung gerakan intensifikasi produksi padi. Namun dibalik kata jasa dari golongan petani tersebut, ada pengorbanan atau kerugian yang sebenarnya tertimpakan kepada mereka, yaitu kemiskinan, tingkat kesejahteraan para petani tidak menggemblakan bahkan buruh tani tersebut masih termasuk bertaraf kehidupan yang rendah. Secara garis besar problem kemiskinan dapat dibedakan atas dua jenis yaitu :

1. Kemiskinan absolut

Kemiskinan dinyatakan dengan tingkatan tertentu yang harus dipenuhi atau diperlukan untuk dapat menjalankan hidup secara layak, tingkatan ini lazim dikenal dengan garis kemiskinan.

Kemiskinan absolut berhubungan dengan besarnya pendapatan yang diperoleh

2. Kemiskinan relatif

Adalah keadaan kekurangan yang dikenali setelah melakukan perbandingan dengan berdasarkan pada suatu dimensi yang sama, misalnya dimensi daerah, dimensi sektor, dimensi negara. Kemiskinan relatif berhubungan dengan distribusinya

Dalam mengukur tingkat kemiskinan ini ada dua ukuran yaitu ;

1. Dimensi tunggal (Single dimension)

Dimensi tunggal ini dalam menyusun indikatornya hanya menggunakan satu dimensi saja

2. Dimensi ganda (Multi dimension)

Dimensi ganda adalah ukuran indikatornya memadukan berbagai dimensi secara integral.

Salah satu permasalahan yang serius yang menjadi penyebab kemiskinan di pertanian dan kesenjangan wilayah ini adalah bahwa di wilayah pedesaan yang notabene dominan pertanian, kualitas sumberdaya manusia relatif rendah, dan alternatif kesempatan kerja diluar sektor pertanian sangat terbatas. Akibatnya, pertambahan jumlah penduduk pedesaan senantiasa akan diikuti oleh meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya lahan.

Tekanan penduduk yang semakin meningkat akan berpengaruh nyata terhadap kualitas dan optimalitas pemanfaatan sumberdaya alam yang semakin menurun (Sendjaja dan Ma'mun 1994).

Pada gilirannya keadaan ini tentu akan menyebabkan penerimaan dan pendapatan masyarakat pedesaan rendah. Proses ini merupakan awal dari lahirnya kondisi lingkungan masyarakat miskin dan membentuk fenomena involusi yang mengarah kepada stagnasi dalam suatu sistem pertumbuhan wilayah. Problema masyarakat pertanian di pedesaan secara intrinsik berhubungan dengan :

1. Pola pemilikan lahan dan produktivitas lahan
2. Struktur kesempatan kerja
3. Mekanisme pasar tenaga kerja

Dalam bentuk yang paling sederhana dapat dikatakan bahwa individu dari berbagai golongan rumah tangga mempunyai perbedaan dalam hal anugrah sumberdaya (resource endowment) yang mereka terima, khususnya limpahan lahan (land endowment) dan modal manusia (human capital). Suatu rumah tangga yang tergolong tidak memiliki lahan dan penguasaan modal manusianya juga terbatas (terutama kualitasnya) akan cenderung terus tenggelam dalam kemiskinannya (Thorbecke dan Pluijijm 1993).

Mencermati peranan pertanian dan peningkatan produktivitasnya dalam pembangunan adalah penting untuk memahami peran yang dapat dijalankan sektor pertanian dalam menambah pendapatan penduduk pedesaan. Bagi negara-negara berkembang yang mayoritas angkatan kerjanya dipekerjakan di sektor pertanian dan dimana kebanyakan masyarakat miskin adalah petani. Pendapatan usahatani (farm income) adalah focus

sentral dalam pertumbuhan ekonomi untuk menambah pendapatan penduduk pedesaan 6) Lewis 2000. Tingkat produktivitas para petani kecil di negara berkembang umumnya hanyalah dapat mencapai sepertiga dari potensi produksinya yang dapat dicapai dalam keadaan produksi optimum, hal ini antara lain disebabkan :

1. Lemahnya program penyuluhan pertanian sehingga tidak mampu mencapai targetnya para petani miskin.
2. Terbatasnya pasar yang kompetitif untuk produksi seperti benih yang bermutu dan pupuk.
3. Terbatasnya pelayanan di sektor pertanian dan pedesaan, menyangkut pelayanan keuangan, perbankan, permodalan, dan teknologi pedesaan
4. Lemahnya pasar produk pertanian

Ada kalangan yang berpendapat bahwa yang diperlukan untuk menambah pendapatan penduduk pedesaan hanyalah pertumbuhan ekonomi. Mereka berkeyakinan bahwa setiap upaya untuk mempromosikan pemberdayaan masyarakat semata mata hanyalah pemborosan energi dan bahkan melemahkan usaha percepatan pertumbuhan.

Didaerah daerah yang kebanyakan masyarakatnya miskin, pertumbuhan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan menciptakan kondisi yang membuat kelompok masyarakat miskin dapat meningkatkan produktivitas dan out put mereka. Secara umum ada tiga mekanisme yang menggambarkan bagaimana peningkatan produktivitas pertanian dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan penambahan pendapatan penduduk pedesaan:

1. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh langsung terhadap kemiskinan, sehingga setiap kontribusi peningkatan produktivitas pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi, akan secara langsung berkontribusi pula terhadap penambahan pendapatan penduduk pedesaan (Timmer, 2002)
2. Pertumbuhan bukan dari sektor pertanian itu sendiri, tetapi dari sektor industri atau jasa, ini menunjukkan bahwa pertanian dapat berkontribusi lebih baik dalam membantu mengangkat taraf hidup masyarakat dari belitan kemiskinan kepada penambahan pendapatan penduduk. Teknologi pertanian modern yang mampu meningkatkan produktivitas tampaknya memainkan

kan peranan penting pula dalam mekanisme ini (Ravallion and Datt, 2002)

3. Ketersediaan pangan berkualitas yang terjangkau bagi komunitas di pedesaan. Peningkatan produktivitas pertanian, terutama untuk komoditas pangan utama akan menghasilkan keadaan dimana pangan bermutu dapat tersedia di desa dengan tingkat harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan bagi penduduk pedesaan antara lain dengan cara Program pengembangan Pasar Desa merupakan upaya mendayagunakan pasar – pasar yang ada di pedesaan sebagaimana dituangkan dalam pasal 206 UU No.32 tahun 2004, pasar desa sebagai salah satu urusan pemerintah yg menjadi kewenangan desa berdasarkan asal usul desa, dimana pasar desa tersebut sudah ada sejak adanya desa yg bersangkutan. Program Pasar Desa dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai sarana bagi masyarakat desa untuk memproduksi dan mengolah hasilnya, menciptakan lapangan kerja, mendorong kehidupan perekonomian desa termasuk lembaga sosial ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli desa (PAD), dengan tujuan memperbaiki daya beli masyarakat dengan pendekatan pola pemberdayaan penguatan sosial - ekonomi masyarakat desa, menyediakan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pasar desa bagi masyarakat, menguatkan kelembagaan dan keswadayaan masyarakat agar berfungsi dan berperan optimal dalam pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, serta mendorong berfungsinya lembaga kredit desa (UED-SP, Koperasi, UPK dl pedesaan.

Gender dan Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

Secara tradisional pesan-pesan penyuluhan didasarkan pada pengalaman petani atau hasil temuan penelitian, kebijakan pemerintah semakin berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh petani. Kebijakan tersebut meliputi tarif dan bea, usaha pencegahan erosi tanah serta pencemaran lingkungan dan kebijakan perencanaan tingkat daerah. Kejelasan peran sangat diperlukan untuk mengkomunikasikan kebijakan kebijakan penting pemerintah bagi petani, peran tersebut antara lain:

1. Membantu berbagai pelaku untuk menyadari persoalan yang membutuhkan kebijakan pemerintah mendefinisikan persoalan tersebut secara jelas dan akurat

2. Menganalisa berbagai pemecahan masalah
3. Menentukan pilihan pemecahan masalah
4. Menginformasikan kepada para pelaku yang terkait keputusan kebijakan.
5. Memantau apakah kebijakan sudah terlaksana sesuai rencana.

Pemilihan strategi komunikasi seharusnya dikaitkan dengan adat istiadat dan pengetahuan, penggunaan bahasa dan sikap kelompok sasaran serta keinginan anggotanya untuk memperoleh informasi. Hal ini banyak ditemui dalam penyuluhan pertanian karena petani percaya bahwa mereka mengelola tanahnya dengan sangat efisien, dan tidak banyak yang dapat dipelajari dari para ahli. Mereka sependapat bahwa saran seorang ahli berguna bagi orang lain tapi kemungkinan tidak bermanfaat bagi mereka. Peranan komunikasi khususnya perkembangan sarana alat komunikasi terhadap proses pembangunan pertanian sangat besar, misalnya telepon bahkan sampai internet sudah bisa dijangkau oleh masyarakat desa termasuk petani.

Paradigma modernisasi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dan pedesaan yang mengutamakan prinsip efisiensi, secara nyata telah mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan pada masyarakat petani, baik struktur sosial, budaya dan politik terutama pada struktur ekonomi di pedesaan. Hal tersebut juga menimbulkan gejala desintegrasi dan diskriminasi dalam "pembagian kerja" antara pria dan wanita di berbagai bidang, yang dikhawatirkan dapat meminggirkan bahkan menghilangkan fungsi produksi kaum wanita. Makalah ini bertujuan mengemukakan berbagai pemikiran (teoritis) tentang peran dan peluang wanita tani, serta memposisikan kembali strategi pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam strategi kebijakan pembangunan pertanian di pedesaan. Peran ganda wanita tani membuktikan sangat penting dan strategisnya pola nafkah ganda, sebagai upaya meningkatkan pendapatan (pse.litbang.deptan.go.id/ind/index.php/publika/forum-argo-ekonomi).

Masuknya telepon dan internet kepedesaan lebih memperlancar arus informasi yang berhubungan dengan usahatani seperti pasar, sarana produksi, teknologi budidaya, teknologi penanganan pasca panen dan lain lain. Untuk memperoleh informasi tersebut peranan penyuluh pertanian sangat diharapkan sebagai mediator antara hasil penelitian untuk disampaikan kepada petani. Dilain pihak peningkatan pengetahuan

keterampilan dan wawasan penyuluh pertanian juga mutlak diperlukan, sehingga penyuluh pertanian mampu melakukan transfer teknologi dan melakukan pendampingan dalam pemecahan masalah yang dihadapi petani.

Pendidikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat tidak hanya dipandang dari sisi formalitasnya, namun lebih kepada proses peningkatan kualitas penduduk melalui: Proses modernisasi pemikiran dalam meningkatkan kesejahteraannya. Pendidikan nonformal menjadi penting (penyuluhan, pemberdayaan). Dengan melihat persoalan-persoalan Nasional maka, sudah waktunya Penyuluh Pertanian berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan non formal yang tertuang didalam rencana kerja tahunan melalui identifikasi tersistemik mulai dari tingkat dusun hingga Kabupaten sesuai level jabatan yang dimiliki para penyuluh Indonesia.

Di dalam perencanaan pendidikan non formal telah tertarget peningkatan persentasi yang harus ditingkatkan yaitu terjadinya perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam mengadopsi inovasi sebagai wujud nyata dalam merubah paradigma modernisasi. Melalui paradigma baru Programa Penyuluhan Pertanian seyogianya, para penyuluh pertanian Indonesia dituntut berperan aktif dalam mendukung target pemerintah yaitu meningkatkan kualitas masyarakat pedesaan yang di dominasi oleh para petani.

Kalau target pembangunan dilihat dari gender maka kita sering mendapati bahwa kaum ibu atau wanita sering meminta kesempatan yang sama dengan laki laki. Di Indonesia ada anggapan bahwa pola interaksi dan interelasi antara perempuan dan laki laki dan politik sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang cenderung patriakal, dengan kekuatan dan kekuasaan baik secara kultural maupun struktural terpusat pada laki laki. Dalam tataran politis, struktur masyarakat seperti ini dianggap cenderung menjadikan peran politik perempuan berada pada posisi terpinggirkan dan senantiasa menjadi subordinat bagi peran politik laki laki. Dominasi laki laki pada wilayah strategis tersebut diduga akan menjadi alat legitimasi untuk memarjinalisasi dan mengabaikan hak hak asasi kaum perempuan, termasuk melakukan penindasan atas mereka.

Potensi wanita tani, sebagai isteri dan ibu rumah tangga, merupakan faktor penting penentu keberhasilan strategi pengarusutamaan gender tersebut. Pemberdayaan perlu dilakukan melalui

teknologi tepat guna dan inovatif, perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, meningkatkan efektifitas penyuluhan dan pelatihan, perbaikan regulasi, fasilitas, dan tingkat upah, pelatihan dan pembinaan ketrampilan industri rumah tangga. Kesempatan kerja agar berimbang antar gender dan mengikutsertakan mereka dalam segala kegiatan pembangunan. Pemberdayaan wanita melalui strategi pengarusutamaan jender (gender mainstreaming), untuk mewujudkan kesejahteraan rumah tangga petani di pedesaan (pse.litbang.deptan.go.id/ind/index.php/publika/forum-argo-ekonomi).

Para aktivis perempuan telah menjadikan perjuangan mereka terfokus pada tiga hal yaitu :

1. Kepemimpinan perempuan dalam kekuasaan
2. Tuntutan kuota perempuan dalam parlemen
3. Tuntutan independensi hak suara perempuan dalam pemilu

Perjuangan seperti tersebut diatas sah sah saja diperjuangkan oleh kaum perempuan, namun tugas tugas pokok sebagai perempuan terlebih kewajibannya sebagai seorang ibu dalam rumah tangga harus tetap sebagai nomor satu, disamping resiko kerja yang sering amat berat untuk ditanggung oleh seorang perempuan, sebagai contoh ketika seorang wanita menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) banyak sekali yang mengalami kekerasan. Fungsi fungsi yang terabaikan ketika perempuan mempunyai tugas atau kegiatan selain tugasnya sebagai ibu rumah tangga adalah :

1. Fungsi pendidikan anak, peran seorang ibu ini terpaksa digantikan oleh orang lain walaupun mereka itu adalah bagian dari keluarga, namun hal ini cenderung kurang sempurna bahkan sering terabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa peran Ibu sangat diperlukan oleh anak anak dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, fungsi asuh anak sulit digantikan oleh orang lain termasuk oleh ayahnya sendiri.
2. Fungsi penanaman nilai agama pada anak dimulai dari rumah dan disaat anak masih balita dan ini diawali oleh Ibu yang sepanjang hari bersamanya. Walau banyak yang membantu untuk mendidik nilai agama pada sianak namun peran Ibu sangat penting dalam rangka penanaman nilai agama pada anaknya.
3. Fungsi kasih sayang yang diberikan Ibu pada anaknya sulit untuk digantikan oleh orang lain.
4. Fungsi Sosialisasi berkaitan dengan pengawasan lingkungan bermain sianak juga mem-

berikan bimbingan kepada sianak mengenai kehidupan sosial dan norma norma sosial, sehingga kehidupan disekitarnya dapat dimengerti oleh sianak.

Tujuan kebijakan pembangunan pertanian di kebanyakan negara adalah meningkatkan produksi pangan dalam jumlah yang sama dengan permintaan bahan pangan yang semakin meningkat dipasar dunia. Kegiatan pertanian di daerah pedesaan yang secara tradisional telah dilakukan sejak zaman nenek moyang kita dulu selalu dilakukan secara bersamaan antara kaum laki laki dan perempuan. Adapun pekerjaan antara laki laki dan perempuan selalu disesuaikan dengan faktor kemampuan gender. Untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga besar dan kuat akan dilakukan laki laki misalnya membajak, mencangkul, membuat saluran air dan sebagainya, sedangkan untuk pekerjaan yang memerlukan ketekunan dan kehati-hatian maka pekerjaan itu akan ditangani oleh perempuan, seperti menabur benih, menanam padi, melakukan pemupukan, memanen padi, menjemur dan sebagainya. Dengan adanya pembangunan pertanian seiring masuknya mekanisasi disektor pertanian, maka pekerjaan pertanian yang selama ini dilakukan secara bersama antara laki laki dan perempuan secara bergotong royong telah digantikan oleh alat kerja mesin.

Organisasi penyuluh pertanian yang efektif sangat penting dalam situasi meningkatkan produksi pangan, selama ini didominasi oleh tenaga laki laki saat ini juga sudah dilakukan oleh tenaga penyuluh pertanian perempuan. Peranan penyuluh pertanian perempuan adalah membantu petani perempuan membentuk pendapat yang sehat dan membuat keputusan yang baik dengan cara berkomunikasi dan memberikan informasi yang mereka perlukan. Selama ini para petani perempuan bersama petani laki laki menerima bimbingan pertanian dari penyuluh pertanian laki laki, dengan adanya pembangunan disektor pertanian yang mengubah pola bertani secara tradisional ke pola bertani yang mekanisasi dan diikuti oleh tersedianya sumber daya manusia penyuluh pertanian perempuan, maka metode penyampaian pesan kepada petani perempuan sudah lebih mudah dan ditinjau dari sudut pandang kepastian hal ini sudah mencerminkan budaya timur. Petani perempuan juga sudah mengalami kemajuan besar dengan adanya penyuluh pertanian perempuan ini.

Perubahan perilaku ini secara sadar telah ikut pula merubah pola pikir masyarakat terhadap peranan gender dalam mengikuti pembangunan di sektor pertanian di pedesaan, dari pola yang selama ini selalu mengunggulkan kaum laki laki dalam pekerjaan di sektor pertanian, telah berubah menjadi setara antara laki laki dengan perempuan. Peranan penyuluh pertanian pada saat ini selain tugas pokoknya juga dititipi dengan upaya untuk memberdayakan dan memberikan peran baru bagi petani perempuan di pedesaan dan dilain pihak, penyuluh pertanian dengan mengenalkan mekanisme pertanian juga telah menggunakan tenaga penyuluh perempuan.

Beberapa keuntungan yang akan dirasakan oleh organisasi penyuluh pertanian dalam menyampaikan pesan kepada para petani di pedesaan, jika penyuluh pertanian terdiri dari penyuluh laki laki dan perempuan :

1. Petugas penyuluh bisa lebih fokus kepada masing masing gendernya
2. Petugas penyuluh dalam mengajar dan berkomunikasi dengan petani punya waktu banyak, karena digunakan oleh khusus gender
3. Petugas penyuluh tidak dibebani tugas ganda lagi
4. Petugas penyuluh lebih mudah bertemu dengan gender karena kesamaan kepentingan

Peranan Komunikasi Pembangunan Partisipatif Dalam Pembangunan Pertanian dan Perdesaan di Indonesia

Proses pembangunan saat ini harus berakar dari bawah (*grassroots*), memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia dan masyarakat. Dengan kata lain pembangunan harus menganut paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Dengan demikian, perlu adanya partisipasi secara aktif, penuh inisiatif dan inovatif dari masyarakat itu sendiri. Sehingga partisipasi masyarakat dalam konteks ini mengandung makna untuk menegakkan demokrasi lokal yang selama ini “terpendam” yang sebenarnya telah dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan proses pemberdayaan masyarakat harus mengandung makna yang dinamis untuk mengembangkan diri dalam mencapai kemajuan.

Pemerintah dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 telah memulai adanya pengembangan otonomi pemerintah desa dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Secara tegas hal ini tersurat dalam Pasal 95 mengenai Pemerintahan

Desa. Dari sini pemerintah telah membuka peluang tumbuhnya partisipasi dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pasal 102, tampak bahwa penduduk desa telah diletakkan pada porsi yang sebenarnya sebagai titik sentral pemerintahan desa, sebagai wujud pemerintahan yang berpusat pada masyarakat, serta menghargai prakarsa masyarakat beserta adapt istiadatnya. Orientasi pembangunan seperti ini tentu akan lebih berhasil guna dan berdaya guna, karena masyarakat diberi kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam proses pembangunan dan menikmati hasil pembangunan tersebut sesuai dengan kemampuannya.

Mikkelsen (2001) mendefinisikan partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.

Di Indonesia, partisipasi seringkali dipahami sebagai “mobilisasi” atau “sosialisasi.” Mobilisasi merupakan praktek yang lazim pada era orde baru. Sementara istilah sosialisasi lebih merupakan penyebaran informasi atau semacam penyuluhan telah dianggap partisipasi. Partisipasi dapat berupa:

1. Pengawasan dan pematauan dari luar oleh kelompok-kelompok warga negara (*citizen based initiatives*) terhadap kinerja dari kebijakan sosial dan layanan-layanan dasar pemerintah dan badan-badan swasta;
2. Peningkatan kinerja dan ketanggapan lembaga pemerintah dengan berbagai langkah (*public sector initiatives*);
3. Sinergi antara pemerintah yang terbuka dan responsives dengan warga negara dan kelompok warga Negara yang aktif (*active citizenship*) dan *wellinformed*.

Bentuk-bentuk komunikasi pembangunan yang partisipatif mencakup forum dialog akar rumput (*grassroots dialog forum*), fungsi baru komunikasi pada media partisipatif (*participatory media*), berbagi pengetahuan secara setara (*knowledge-sharing on a co-equal basis*), dan model komunikator pendukung pembangunan (*Development Support Communication*).

Dialog akar rumput (*grassroots dialog*) didasarkan atas kaidah partisipasi untuk ditemperemukan sumber dan agen perubahan langsung dengan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penyadaran (*conscientization*) melalui dialog.

Lebih jauh lagi masyarakat diajak untuk merumuskan permasalahan dan menemukan pemecahannya sekaligus pelaksanaan kegiatan dalam upaya pemecahan permasalahan. Di sini komunikator sekaligus berperan sebagai pembebas masyarakat dalam proses pembangunan.

Peran komunikasi pada media partisipatif (*participatory media*) adalah: (1) Mengembangkan identitas kultural komunitas; (2) Sebagai kendaraan bagi ekspresi diri warga negara; (3) Memfasilitasi artikulasi masalah; (4) Alat mendiagnosis permasalahan dalam komunitas; (Mengoptimalkan media rakyat yang sesuai dengan kultur lokal.

Peran komunikasi pembangunan untuk berbagi pengetahuan (*knowledge-sharing model*) secara setara memusatkan perhatian kepada posisi yang setara antara pemberi dan penerima manfaat pembangunan (*benefactors and beneficiaries*). Dalam posisi setara ini keduanya saling mempengaruhi dan berbagi pengetahuan. Di sini dikombinasikan antara paradigma dominan dan kritis karena dipandang menjadi lebih lengkap dalam menjalankan komunikasi pembangunan. Model berbagi pengetahuan yang diusulkan oleh Nair dan White (1987) ini merupakan suatu model komunikasi transaksional yang akan melengkapi gagasan mengenai Pembagian-Pengetahuan yang seimbang dengan bentuk partisipasi tinggi, sedang, dan rendah antara penerima dan sumber komunikasi pembangunan yang selanjutnya dibagi ke dalam sembilan bentuk peran yang ditandai oleh sembilan sel, yaitu:

1. Keikutsertaan tinggi (*High Participation*) adalah dilibatkan, aktif, kreatif dengan interaksi berlanjut dan dialog. Kekuasaan dibagi antara sumber dan penerima.
2. Keikutsertaan sedang (*Quasi Participation*) adalah lebih sedikit intens, lebih sedikit kreatif dan menggunakan lebih sedikit dialog.
3. Keikutsertaan rendah (*Low Participation*) menyarankan sedikit dialog, tidak ada keterlibatan penuh dan tidak ada *consciousness* menyangkut kebutuhan akan perubahan.

Model komunikator pendukung pembangunan (*Development Support Communicator*) memusatkan pada penyusunan posisi-posisi yang sejajar, tidak memusatkan pada penyusunan posisi-posisi yang sejajar, tidak memusatkan pada media, sebaliknya mengembangkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (Melkote, 1991). Komunikator berperan sebagai mediator antara tenaga ahli dan pemanfaat pembangunan,

sehingga kesenjangan informasi antara tenaga ahli dengan pemanfaat pembangunan dapat dikurangi.

Kesimpulan

Isu yang menyangkut kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan ditinjau dari sudut pandang tersebut berikut ini, Kerangka Makro Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Peningkatan Pendapatan Penduduk Pedesaan dan Gender dan Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan oleh pemerintah adalah semata mata untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia secara umum dan para petani penggarap tanah yang ada di desa secara khusus, peningkatan pendapatan penduduk pedesaan dapat dilakukan dengan cara peningkatan produktivitas hasil pertanian, dengan menggunakan mekanisasi pertanian, pemilihan bibit yang baik, pola penanaman, pemupukan, pasca panen, gender dan pembangunan pertanian dan pedesaan, bahwa para penyuluh pertanian dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat yang selama ini telah melekat mendarah daging tentang perbedaan gender, bentuk-bentuk komunikasi pembangunan yang partisipatif mencakup forum dialog akar rumput (*grassroots dialog forum*), fungsi baru komunikasi pada media partisipatif (*participatory media*), berbagi pengetahuan secara setara (*knowledge-sharing on a co-equal basis*), dan model komunikator pendukung pembangunan (*Development Support Communication*).

Daftar Pustaka

- Cassell C, Symon G., "*Qualitative Methods in Organizational Research*", Sage, London, 1994
- Chitnis, Ketan, "*Recasting the Process of Participatory Communication through Freirean Praxis: The Case of the Comprehensive Rural Health Project in Jamshed, India*", Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, Sheraton New York, New York City, 2011
- Gumilar. G., "Peran Kom dlm pembangunan", 2008.
<http://www.gumilarcenter.com/Makalah/PERANANKOMUNIKASIDALAMPEMBANGUNAN.pdf>.

Kurnadi Shahab, "Sosiologi Pedesaan", AR-RUZZ MEDIA, Yogyakarta, 2006

Lutfi Fatah, "Dinamika pembangunan pertanian dan pedesaan", jurusan sosek fakultas pertanian Unlam, Banjarbaru, 2006

Lewis, W.A., "*Development strategy in a limping world economy*", Oxford university press, 2000

Melkote, S. R., "*Communication for Development in the Third World: Theory and Practice*", New Delhi, India: Sage Publications. In Theory and Practice of Participatory Communication: The case of the FAO Project "Communication for Development in Southern Africa". Dissertation. The University of Texas at Austin, 1991

Melkote, S.R & Steeves, H.L., "*Communication for Development in the Third World; Theory and practice for Development*", Sage Publication, New Delhi, 2001

Ravallion, M, and G. Datt. W., "*Why has economic growth been more pro-poor in some states of India than in others?*", 2002

Sendjaja dan Ma'mun, "Menggerakkan Investasi Pengembangan Industrialisasi Jawa Barat dalam posiding", PERHEPI, 1994

Timmer, C.P., "*Agriculture and Economic Growth, The Handbook of Agricultural Economics*", Vol. II. Nort Holland, Amsterdam, 2002

Thorbecke dan Pluijijm, "*Rural Indonesia sosioeconomic development*", 1993